



**RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK SERTA PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
KOTA TARAkan
TAHUN 2026**

**PEMERINTAH KOTA TARAkan
TAHUN 2026**



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta 'ala atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025. Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2026 yang telah ditetapkan dan merupakan tahun kelima pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 2 (dua) tahun ke depan.

Berdasarkan pada hasil evaluasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan/sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun Anggaran 2026, melalui Rancangan Awal Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.

Tarakan, Maret 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

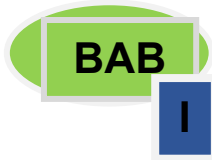
Hasman Parigi, S.E., M.M
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19720822 2010011 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA.....	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan.....	24
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan.....	31
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	36
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	59
BAB III TUJUAN DAN SASARAN.....	60
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	60
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan	61
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	73
4.1. Program dan Kegiatan.....	73
4.2. Pendanaan	73
BAB V PENUTUP.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2026	12
Tabel 2	Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	27
Tabel 3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	37
Tabel 4	Tujuan dan Sasaran Tahun 2025	63
Tabel 5	Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.....	64
Tabel 6	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025 ..	74



PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagai Salah Satu Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan merupakan Instansi Pelaksana yang melakukan kegiatan pelayanan Pemerintahan kepada masyarakat dalam bentuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 - 2026, dimana tahun 202 merupakan pelaksanaan tahun ke dua dalam periode Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025 – 2026 yang diarahkan sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pada satu tahun anggaran berjalan sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

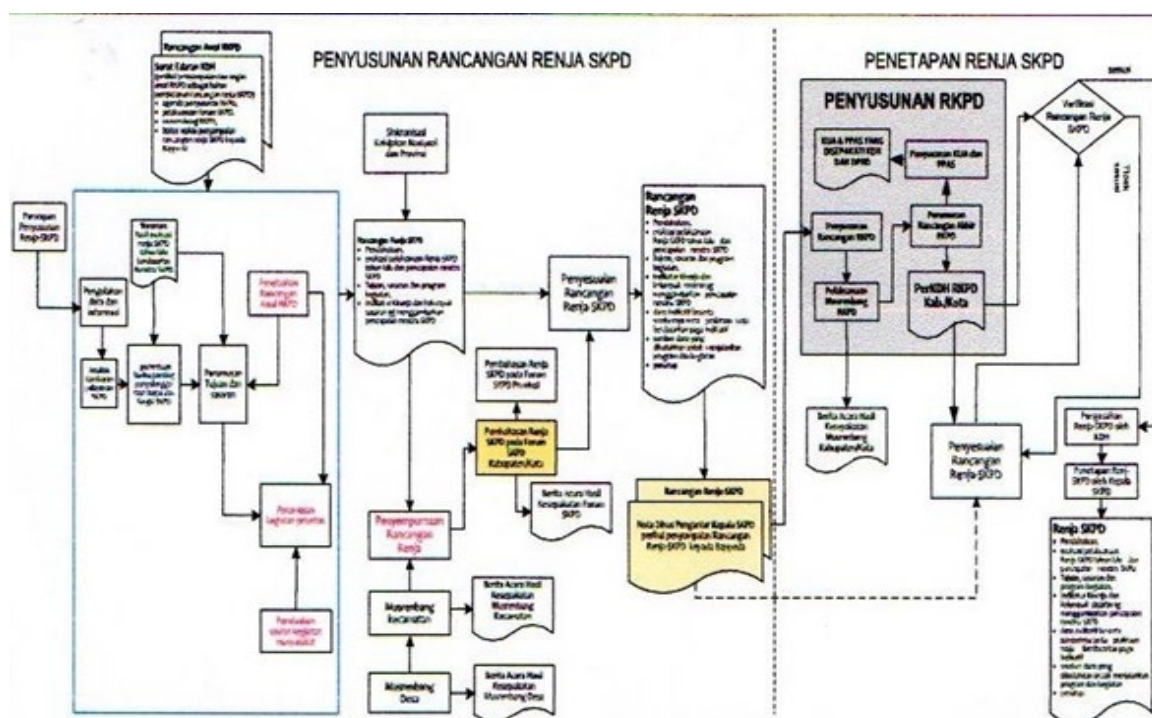
Memperhatikan surat Edaran Walikota Tarakan Nomor 050/06/Bappeda-Litbang tanggal 06 Januari 2023 tentang Persiapan Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Tarakan Tahun 2026 bahwa Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2026.

Berdasarkan pada uraian di atas, serta untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka disusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kota Tarakan 2026.

Rancangan Awal Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun berdasarkan :

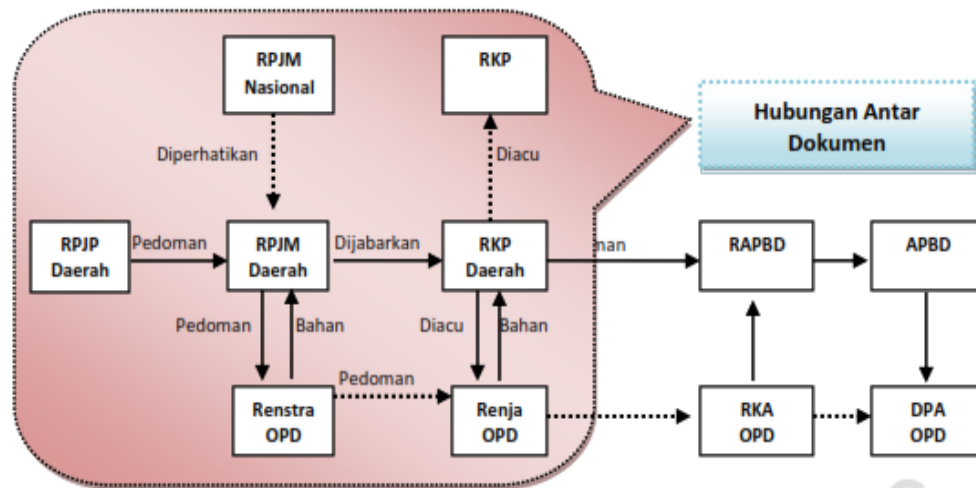
1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu.
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif.
3. Urusan wajib non pelayanan dasar yang mengacu pada IKU dan IKK sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.



Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja Perangkat Daerah

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup satuan kerja merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari

sistem perencanaan pembangunan sebagai sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.2 Bagam Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Penyelenggaraan Evaluasi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
24. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
26. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024;
28. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
29. Peraturan Wali Kota Nomor 68 tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
30. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 – 2026
31. Peraturan Walikota Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 .

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja ini untuk memantapkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sehingga lebih akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam keberhasilan mencapai tujuan dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik (*Good Government*) dengan penyelenggaraan seiring dalam perwujudan pelaksanaan sistem pertanggungjawaban kinerja yang lebih jelas, tepat dan terukur. Adapun Maksud dari Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2026;
2. Untuk menerjemahkan Perencanaan Strategis Lima Tahunan yang dituangkan

dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ke dalam Perencanaan Tahunan yang sifatnya lebih operasional; dan

3. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman dalam 1 (satu) tahun.

Sedangkan Tujuan dari Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah:

1. Sebagai acuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Tarakan Tahun 2025, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPD Kota Tarakan Tahun 2025 – 2026;
2. Menetapkan program dan kegiatan serta sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan tahun 2026;
3. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana program dan kegiatan serta sub kegiatan;
4. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2026, sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam APBD Tahun 2026.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TARAKAN

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan, analisis kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan, review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TARAKAN

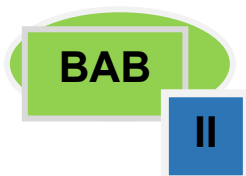
Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, indikator kinerja, tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TARAKAN

Bab ini memuat Program dan Kegiatan serta sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.



HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap dokumen perencanaan harus di evaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan dan hasil rencana program dan kegiatan. Hasil evaluasi pelaksanaan Rancangan **Awal** Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada tahun lalu (2024), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan 10 (sepuluh) Program, 26 (dua puluh enam) kegiatan dan 54 (lima puluh empat) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 9.379.573.220,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 8.694.762.528,-** atau **92,70%**.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta realisasi anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana .

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan) s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.8.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100 %		
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersedia	4 dokumen	-	-	-	-	4 dokumen	-	-
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	-	-
2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	-	-
2.08.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	-	-
2.8.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	4 Layanan	2 layanan	2 Layanan	2 layanan	100 %	4 layanan	-	-

2.8.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapatkan gaji dan tunjangan	25 orang/bln	24 orang	24 Orang	24 Orang	100 %	25 orang/bln	-	-
2.8.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	-	-
2.8.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	4 Layanan	3 layanan	3 Layanan	3 Layanan	100 %	4 layanan		
2.8.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	-	-
2.8.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	-	-
2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	-	-
2.8.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	4 kali	7 Kali	7 Kali	100 %	7 Laporan	-	-
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	5 unit	23 unit	23 unit	23 unit	100%	5 unit		
2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	23 unit	23 unit	23 unit	100%	5 unit		
2.8.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 layanan	100 %	2 layanan		
2.8.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %	1 laporan	-	-
2.8.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %	1 laporan	-	-
2.8.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	30 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	100 %	30 Unit		
2.8.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	100 %	8 unit	-	-

	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dan dibayarkan Pajaknya								
2.8.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	100 %	14 unit	-	-
2.8.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	15 unit	15 unit	15 unit	100 %	15 unit	-	-
2.8.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	100 %	1 Unit	-	-
2.8.02..	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1. Cakupan PUG yang aktif	12%	56,67%	53%	56,67%	107%	12%		
		2. Persentase ARG pada APBD	-	10%	12%	10%	83,33%	-		
2.08.02.2.01	<i>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang dilatih PUG</i>	1 Lembaga	<i>2 organisasi</i>	<i>2 lembaga</i>	<i>2 lembaga</i>	100 %	<i>1 lembaga</i>	-	-
2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 OPD	30 OPD	30 OPD	30 OPD	100 %	30 OPD	-	-
2.08.02.2.03	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah lembaga yang dibina</i>	<i>2 lembaga</i>	<i>2 lembaga</i>	<i>2 lembaga</i>	<i>2 lembaga</i>	100 %	<i>2 lembaga</i>		
2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	2 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	100 %	2 lembaga		

	Kabupaten/Kota									
2.8.03..	Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlayani	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%		
		Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	-	130,01%	17,95%	17,41%	130,01%	diisi		
2.8.03.2.01.	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	7 Kegiatan	15 kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	100 %	7 kegiatan	-	-
2.8.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	15 koordinasi	20 Koordinasi	20 Koordinasi	100 %	4 dokumen	-	-
2.8.03.2.02.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang mendapat pelayanan (data simponi)	90 kasus	20 kasus	20 kasus	20 kasus	100%	90 kasus	-	-
2.8.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	90 orang	20 kegiatan	20 orang	20 orang	100 %	90 orang	-	-
2.8.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 layanan	4 layanan	4 layanan	4 layanan	100%	4 layanan		
2.8.03.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang didampingi	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	100%	1 lembaga		
2.8.03.2.03.001	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	100%	50 orang		

	Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas								
2.8.04..	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Keluarga yang mendapatkan informasi tentang Kesetaraan Gender dan Hak Anak	-	35%	35%	35%	100%	-	-	-
		Persentase Puspuga yang aktif	25%	-	-	-	-	25%	-	-
2.8.04.2.01.	<i>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah media KIE yang memuat informasi kesetaraan gender dan hak anak yang terdistribusi</i>	100 buah	100 buah	100 keluarga	100 keluarga	100%	100 buah	-	-
2.8.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 dokumen	1 dokumen	80 orang	80 orang	100 %	1 dokumen	-	-
2.8.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen		
2.8.04.2.02.	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah organisasi yang dikuatkan dan dikembangkan</i>	2 organisasi	2 organisasi	2 organisasi	2 organisasi	100%	2 organisasi	-	-
2.8.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	30 orang	30 Orang	30 Orang	100 %	30 orang	-	-
2.08.04.2.03	<i>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak</i>	40 Layanan	40 Layanan	40 Layanan	40 Layanan	100 %	40 Layanan	-	-

2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	40 layanan	40 layanan	40 layanan	40 layanan	100 %	40 layanan	-	-
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
2.08.05.2.01	<i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah dokumen responsif gender</i>	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	-	-
2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	-	-
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase pemenuhan indikator KLA	-	100%	33,33 persen	77,43%	200%	-	-	-
		Nilai indikator penilaian mandiri Kota Layak Anak	875	-	-	-	-	875		
2.08.06.2.01	<i>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah gugus tugas KLA yang terbentuk</i>	<i>1 gugus tugas</i>	<i>1gugus tugas</i>	<i>1 gugus tugas</i>	<i>1 gugus tugas</i>	100%	<i>1 gugus tugas</i>	-	-
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	39 organisasi	39 organisasi	39 organisasi	39 organisasi	100 %	39 organisasi	-	-
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-

2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang aktif	4 lembaga	4 lembaga	4 lembaga	4 lembaga	100%	4 lembaga	-	-
2.08.06.2.02.0001	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	-	-
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	-	-
2.8.07..	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	0,020%	30 kasus	0,022%	0,078%	352,50%	0,021%	-	-
		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	-	-
2.8.07.2.01.	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	7 Kegiatan	2 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	7 Kegiatan	-	-
2.8.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 dokumen	5 kegiatan	95 Orang	95 Orang	100 %	4 dokumen	-	-
2.8.07.2.02.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus anak	20 kasus	30 kasus	20 kasus	91 kasus	455 %	20 kasus	-	-
2.8.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan	8 layanan	30 kasus	20 layanan	91 layanan	455 %	8 layanan	-	-

	Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota								
2.8.07.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan yang mendapatkan pendampingan	5 lembaga	-	7 lembaga	7 lembaga	100%	7 lembaga	-	-
2.8.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	5 dokumen	-	25 Orang	25 Orang	100 %	7 dokumen	-	-
2.14.2..	Program Pengendalian Penduduk	Persentase keluarga yang terdata	50%	45,77	53,35	45,77	84,97%	50%	-	-
		TFR	-	2,45	2,24 INDEKS	2,45	107,02%	-	-	-
		Median (nilai tengah) usia kawin pertama perempuan seluruh wanita umur 25-49 tahun	-	24,55	25 tahun	24,55	82,91%	-	-	-
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data keluarga	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	-	-
2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	-	-
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (GDPK)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	-	-
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %	1 laporan	-	-
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	-	-
2.14.3..	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	-	70,22%	65,15%	70,22%	107,78%	-	-	-

		Unmeet need	-	14,60%	25,50%	14,60%	57,25%	-	-	-
		Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPk	84,00%	87%	65%	87%	134%	84,00%	-	-
2.14.3.2.0008.	Pengendalian Program KKBPk	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPk	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	-	-
2.14.3.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan		
2.14.3.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), danMini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 laporan	3 kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	6 dokumen	-	-
2.14.3.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 dokumen	41 buah	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100 %	5 dokumen	-	-
2.14.3.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 dokumen	4 kegiatan	2 Kegiatan	1 kegiatan	50,00%	0	-	-
2.14.3.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasikepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	10 organisasi	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %	1 laporan	-	-
2.14.3.2.02.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah tenaga penyuluh KB dan petugas lapangan KB yang aktif	16 orang	17 orang	17 orang	17 orang	100%	17 orang	-	-

2.14.3.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	80 orang	160 orang	80 Kader	80 Kader	100 %	80 orang	-	-
2.14.3.2.03.	<i>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah pelayanan KB</i>	<i>3 pelayanan</i>	<i>3 layanan</i>	<i>1 laporan</i>	<i>1 laporan</i>	<i>100 %</i>	<i>3 layanan</i>	-	-
2.14.3.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %	1 laporan	-	-
2.14.3.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	148 orang	60 orang	144 Orang	700 Orang	486,11 %	148 orang	-	-
2.14.3.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100 %	1 unit	-	-
2.14.3.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan		
2.14.3.2.04.	<i>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>	<i>Jumlah stakeholder atau pemangku kepentingan atau mitra kerja yg berperan scr aktif dlm pengelolaan program KKBPK</i>	<i>85 mitra kerja</i>	<i>85 linsek</i>	<i>85 mitra kerja</i>	<i>85 mitra kerja</i>	<i>100 %</i>	<i>85 mitra kerja</i>	-	-
2.14.3.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 dokumen	-	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100 %	4 laporan	-	-
2.14.3.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan	4 kampung	-	4 kampung	4 kampung	100%	4 kampung		

	Kampung Keluarga Berkualitas	Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)								
2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	-	-
2.14.04.2.01	<i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	<i>Jumlah kegiatan</i>	<i>2 kegiatan</i>	<i>2 kegiatan</i>	<i>2 kegiatan</i>	<i>2 kegiatan</i>	<i>100 %</i>	<i>2 kegiatan</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2.14.04.2.01.0028	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %	1 laporan	-	-
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	100 %	20 unit	-	-
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	100 %	30 Orang	-	-
2.14.04.2.01.0017	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	2 kelompok	2 kelompok	2 kelompok	2 kelompok	100 %	2 kelompok	-	-

	Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	yang dibentuk								
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	-	-
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	-	-
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	-	-

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 berdasarkan target Indikator Kinerja Program Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Adapun capaian realisasi Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan 2 indikator. Indikator pertama adalah cakupan PUG yang aktif, sayangnya data capaian dari bidang belum ada dari target yang ditentukan yaitu 33 % disebabkan karena pengukuran yang sulit dilakukan. Indikator kedua adalah persentase ARG pada APBD dengan target 11% dan capaiannya 31,51%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 99,59% dengan realisasi keuangan sebesar 99,16%. Realisasi fisik dan keuangan masuk dalam kriteria sangat tinggi

2. Program Perlindungan Perempuan

Adapun rata-rata capaian realisasi Program Perlindungan Perempuan dengan 2 indikator. Indikator pertama adalah persentase kasus kekerasan terhadap Perempuan yang terlayani dengan target 100% dan realisasi mencapai 100%. Indikator kedua adalah rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, dan realisasi fisik sebesar 98,21% sedangkan realisasi keuangan sebesar 80,93% masuk dalam kriteria sangat tinggi dan untuk realisasi keuangan masuk kriteria tinggi.

3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Adapun rata-rata capaian realisasi fisik Program Peningkatan Kualitas Keluarga mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,96% yang masuk dalam kriteria sangat tinggi.

4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Adapun rata-rata capaian realisasi fisik Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar 92,96% yang masuk dalam kriteria sangat tinggi.

5. Program Perlindungan Khusus Anak

Adapun rata-rata capaian realisasi fisik Program Perlindungan Khusus Anak mencapai 97,32% dan realisasi keuangan sebesar 91,93%. Realisasi fisik dan keuangan masuk dalam kriteria sangat tinggi

6. Program Pengendalian Penduduk

Adapun rata-rata capaian realisasi fisik Program Pengendalian Penduduk mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar 84,38% yang masuk dalam kriteria tinggi.

7. Program Pembinaan Keluarga Berencana

Adapun rata-rata capaian realisasi fisik Program Pembinaan Keluarga Berencana mencapai 98,67% dan realisasi keuangan sebesar 92,82%. Realisasi fisik masuk dalam kriteria sangat tinggi dan untuk realisasi keuangan masuk kriteria tinggi.

8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Adapun rata-rata capaian realisasi fisik Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) mencapai 99,90% dan realisasi keuangan sebesar 78,49%. Realisasi fisik masuk dalam kriteria sangat tinggi sedangkan untuk realisasi keuangan masuk kriteria sedang. Hal ini terjadi karena dana tidak terserap maksimal dikarenakan beberapa masalah teknis di lapangan tidak terserapnya anggaran transport serta pulsa oleh kader. Harga BKB Kit yang mengalami banyak penurunan dari harga penawaran awalnya.

9. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Adapun rata-rata capaian realisasi fisik Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mencapai 99,97% dan realisasi keuangan sebesar 90,97% yang masuk dalam kriteria sangat tinggi.

Dan permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam peningkatan pelayanan adalah :

1. Anggaran yang dari DAK Non Fisik BOKB tidak terserap maksimal karena penuruanan harga BKB Kit dari harga penawaran awal sehingga terjadi SILPA.

2. Kader yang tidak mengumpulkan laporan bulanan sehingga tunjangan pulsa dan transport bagi kader tidak terserap secara optimal.
3. Masalah teknis upaya penanggulangan stunting di lapangan

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TARAKAN.

Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu upaya-upaya strategis yang secara menyeluruh dan terpadu meliputi perumusan kebijakan Program operasional dan kegiatan-kegiatan. Untuk itu dibutuhkan jalinan kerja sama yang kuat dan kepercayaan antara masyarakat dan instansi terkait.

Keberhasilan program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan sulit untuk terwujud jika tidak didukung oleh berbagai faktor internal antara lain perencanaan program yang akuntabilitas, aparat yang terampil serta dukungan dana yang memadai. Sedangkan yang menjadi faktor eksternalnya adalah bentuk kepercayaan masyarakat terhadap program-program yang ditawarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan mengacu pada satu tujuan mewujudkan visi dan misi Kota Tarakan yang akan dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan beserta program prioritas.

Berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan evaluasi capaian target kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menjalankan tugas dan fungsinya, bahwa realisasi capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara umum sampai dengan tahun 2023 telah memenuhi target. Namun, kendala yang ada sampai saat ini adalah terbatasnya sarana dan prasarana dalam peningkatan pemberian pelayanan bidang pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak serta pelayanan dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Keberhasilan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dapat dilihat pada **tabel 2** berikut ini :

Tabel 2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	Target IKU/IKK	Target Renstra Tahun 2019 s/d 2024					Realisasi Capaian	Proyeksi tahun	Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025	
1	2		3	4	5	6	7	8	10	12	13
1	IPG		92,10	91,90	92	92,10	92,29	92,30	92,70	92,30	
2	IDG		59,93	59,72	59,73	59,93	60,13	60,33	58,61	60,13	
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 Perempuan		18,50	18,89	18,72	18,50	17,20	17,95	17,41	17,95	
4	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan (KtP)		0,03	-	-	-	-	-	-	0,03	Indikator baru
5	Rasio Kekerasan terhadap Anak		18,50	18,89	18,72	18,50	17,20	17,95	2,56	17,95	
6	Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak (KtA)		0,12	-	-	-	-	-	-	0,12	Indikator baru
7	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)		64,15	63,13	63,15	64,15	65,15	66,15	70,22	67,2	
8	Nilai SAKIP		70	65,82	68	70	71	72	70,30	72	
9	Persentase ARG pada belanja langsung APBD		10	na	10	10	11	12	10	12	
10	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlayani		100	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait		100	100	100	100	100	100	100	100	

12	Cakupan PUG yang aktif		12	-	-	-	-	-	-	12	Indikator baru
13	Persentase Puspuga yang aktif		25	-	-	-	-	-	-	25	Indikator baru
14	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak		100	-	-	-	-	-	-	100	Indikator baru
15	Nilai indikator penilaian mandiri Kota Layak Anak		875	-	-	-	-	-	-	875	Indikator baru
16	TFR (Angka Kelahiran Total)		2,28	2,3	2,29	2,28	2,25	2,24	2,25	2,24	
17											Indikator baru
18	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		24,25	25,98	24,50	24,25	24,00	23,50	14,60	23,50	
19	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG		7	5	5	7	8	10	30	10	
20	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani		100	100	100	100	100	100	100	100	
21	Tersedianya dokumen Gran Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan		-	-	-	-	-	1	1	1	2023 proses penyusunan
22	Persentase keluarga yang terdata		50	100	100	100	100	100	100	50	
23	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita Umur 25-49 tahun		25	-	25	25	25	25	25	25	
24	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK		55	-	50	55	60	65	87		
25	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP		100	-	-	-	-	-	100	-	
26	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKPJ)		5,93	-	-	-	-	-	18,2	-	
27	Persentase Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina		100	-	-	-	-	-	-	100	Indikator baru

Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan di analisis merupakan berdasarkan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 berdasarkan target Indikator Kinerja Program Tahun 2023 adalah sebagai berikut: :

1. Masalah capaian indikator rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 perempuan yang lebih besar dari target. Indikator ini adalah indikator negatif jadi yang diharapkan adalah semakin kecil nilai capaian dari target. Hal ini terjadi bisa karena semakin banyaknya masyarakat yang terpapar akan informasi sehingga saat ada kejadian kekerasan yang menimpa perempuan baik dalam rumah tangga atau di luar rumah tangga mereka peduli dan berani melaporkan. Sehingga timbul peningkatan dari jumlah kasus yang ada.
2. Hal yang sama terjadi pada indikator rasio kekerasan terhadap anak meski masih dibawah target. Indikator ini adalah indikator negatif juga. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan kasus kekerasan pada anak dalam jumlah yang melampaui target yang ditentukan.
3. Masih tingginya indikator persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) dari target yang ditetapkan. Banyak hal yang menyebabkan hal ini terjadi antara lain keakuratan data, kurang efektifnya pembinaan kader pengumpul data di lapangan, penyampaian kuesioner pada asektor yang kurang maksimal dimengerti oleh responden.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi Kepala Daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan.

Isu-isu penting merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan terkait kesekretariatan:

- 1) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- 2) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

b. Permasalahan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak:

- 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
- 2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
- 3) Pengelolaan Data Informasi Gender yang relatif rendah, terlihat dari data yang kurang lengkap.
- 4) Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT maupun anak.
- 5) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
- 6) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 7) Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.
- 8) Penyusunan ARG belum ada, data responsif gender belum maksimal

c. Permasalahan terkait pengendalian penduduk dan keluarga berencana

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ber-KB
- 2) Prinsip keyakinan sekelompok masyarakat tidak boleh ber-KB
- 3) Masih kurangnya SDM penyuluh KB

- 4) Masih kurangnya SDM Kader
- 5) Metoda pendataan yang masih konvensional
- 6) Kurang pedulinya masyarakat terhadap pentingnya pendataan keluarga
- 7) Belum optimalnya pendataan keluarga untuk dientry dalam aplikasi Sistem Informasi Keluarga
- 8) Belum optimalnya indicator data resiko stunting dan penanganan keluarga yang berisiko stunting.

2. Kelemahan

Kelemahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.
- b. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender
- c. Terbatasnya personil terlatih yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- d. Kurangnya pegawai yang memiliki SDM yang handal sesuai tupoksinya
- e. Kurangnya kesadaran masyarakat akan ber-KB
- f. Prinsip keyakinan sekelompok masyarakat tidak boleh ber KB
- g. Masih Kurangnya SDM penyuluh KB
- h. Kurangnya koordinasi dengan lintas Perangkat Daerah dalam penanganan stunting.

3. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- i. Masih banyaknya orang yang enggan memakai alat kontrasepsi karena larangan agama.
- j. Adanya keyakinan bahwa penggunaan alat kontrasepsi seperti kondom dianggap melegalkan perzinaan dan seks bebas.
- k. Ada pula potensi hambatan dari Rancangan Revisi KUHP yang sedang dibahas DPR : larangan mempertunjukkan alat kontrasepsi yang berpotensi mempidanakan banyak pihak.

Selain beberapa faktor minor seperti keinginan pasangan memiliki anak lagi, lagi hamil

4. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RKPD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- g. Dukungan pemerintah pada program Keluarga Berencana dengan program Kampung Keluarga Berencana.

- h. Dukungan para ulama akan penggunaan alat kontrasepsi dan pengaturan kelahiran.
- i. Pilihan penggunaan beragam metode kontrasepsi berdasarkan pilihan aseptor.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan berdasarkan Rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

Review terhadap rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dapat dijabarkan pada **Tabel 3** di bawah ini

Tabel 3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2026

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RENJA 2026			Hasil Analisis Kebutuhan			Alasan	Realisasi 2024
1	2	3	4	5		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(3)	(4)	(5)		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	8.	..			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			4.952.709.150			4.952.709.150		8.292.335.415,00
2	8.	01.	.		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	3.930.789.883	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	4.180.789.883		3.764.756.413
2	8.	01.	2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersedia	1 Dokumen	9.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersedia	1 Dokumen	9.000.000		0
2	8.	01.	2.01.	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.000.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.000.000		0
2	8.	01.	2.01.	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000		0
2	8.	01.	2.01.	008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Laporan	5.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Laporan	5.000.000		0
2	8.	01.	2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2 Layanan	#####	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2 Layanan	#####		3.602.828.383

2	8.	0	2.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang/bln	3.637.288.978	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang/bln	3.887.288.978	Kekurangan anggaran gaji P3K beserta TPPnya (250000000)	3.555.933.883
2	8.	0	2.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	58.926.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	58.926.000		46.894.500
2	8.	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	3 Layanan	62.417.700	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	3 Layanan	62.417.700		72.072.845
2	8.	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	24.996.060	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	24.996.060		17.958.385
2	8.	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	4.979.840	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	4.979.840		4.703.460
2	8.	0	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 laporan	32.441.800	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 laporan	32.441.800		49.411.000
2	8.	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	23 Buah	44.277.850	Jumlah aset/BMD yang diadakan	23 Buah	44.277.850		44.245.000
2	8.	0	2.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 buah	44.277.850	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 buah	44.277.850	Pembelian wireless portable sound system with microphone (1 buah); laptop 2 buah (bidang)	44.245.000
2	8.	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	2 Layanan	73.516.021	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	2 Layanan	73.516.021		45.610.185
2	8.	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	2.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	2.000.000		2.000.000
2	8.	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	71.516.021	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	71.516.021		43.610.185
2	8.	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	30 Unit	45.363.334	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	30 Unit	45.363.334		43.633.450

2	8.	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	2.709.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	2.709.000		1.918.300
2	8.	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	32.784.334	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	32.784.334		32.095.150
2	8.	0	2.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	9.870.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	9.870.000		9.620.000
2	8.	0	-		Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan PUG yang aktif	12%	263.842.640	Cakupan PUG yang aktif	12%	288.394.000		263.053.800
2	8.	0	2.0		<i>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang dilatih PUG</i>	<i>1 Lembaga a</i>	<i>13.842.640</i>	<i>Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang dilatih PUG</i>	<i>1 Lembaga a</i>	<i>38.394.000</i>		<i>13.053.800</i>
2	8.	0	2.0	000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 OPD	13.842.640	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 OPD	38.394.000	naik 24.551.360 buat mendatangka n narsum pelatihan ARG sbg salah satu indikator KLA dari Provinsi dan pelatih nasional	13.053.800
2	8.	0	2.0		<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah lembaga yang dibina</i>	<i>2 lembaga a</i>	<i>250.000.000</i>	<i>Jumlah lembaga yang dibina</i>	<i>2 lembaga a</i>	<i>250.000.000</i>		<i>250.000.000</i>
2	8.	0	2.0		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	2 lembaga	250.000.000	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	2 lembaga	250.000.000	dana hibah dharmawati dan GOW	250.000.000
2	8.	0	-		Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang	100%	283.388.190	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang	100%	283.388.190		

						terlayani			terlayani				
2	8.	0	2.0		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	7 Kegiatan	68.585.130	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	7 Kegiatan	68.585.130		68.556.425
2	8.	0	2.0	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	68.585.130	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	68.585.130	Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama LS dalam rangka Pencegahan KTP, TPPO dan Perkawinan Anak (peserta PD, Lembaga Kemasyarakatan, LK3, PUSPAGA, Kemenag, Pengadilan Agama, FKUB, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Dewan Gereja dll); Penggerakkan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan KTP, TPPO dan Perkawinan Anak (Memberikan KIE ke masyarakat di wilayah Kecamatan Tarakan Tengah dan Kecamatan Tarakan Barat). Tahun 2024 sdh dilakukan di Tarakan Timur dan Tarakan Utara.	68.556.425

2	8.	0	2.0		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang mendapat pelayanan (data simponi)	90 kasus	195.951.360	Jumlah kasus yang mendapat pelayanan (data simponi)	90 kasus	195.951.360		158.734.842
2	8.	0	2.0	000 1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	90 orang	15.369.500	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	90 orang	15.369.500	operasional Sedungan	11.117.060
2	8.	0	2.0	000 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 layanan	180.581.860	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 layanan	180.581.860	anggaran untuk untuk kasus TPPO dan perlu menampung korban di rumah aman perlu konsumsi untuk korban dan security kasus (Satpol PP) juga biaya konseling bagi konselor	147.617.782
2	8.	0	2.0		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang didampingi	1 lembaga	18.851.700	Jumlah Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang didampingi	1 lembaga	18.851.700		16.749.040
2	8.	0	2.0	000 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 orang	18.851.700	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 orang	18.851.700	Sosialisasi peningkatan Kapasitas Bagi Lembaga Penyedia Layanan peserta : LK3, P2TP2A, PATBM, paralegal	16.749.040
2	8.	0			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Puspuga yang aktif	25%	45.649.290	Persentase Puspuga yang aktif	25%	45.649.290		44.657.840
2	8.	0	2.0		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media KIE yang memuat informasi kesetaraan gender dan hak anak yang terdistribusi	100 buah	23.346.570	Jumlah media KIE yang memuat informasi kesetaraan gender dan hak anak yang terdistribusi	100 buah	23.346.570		23.224.150

2	8.	0	2.0	000	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 dokumen	13.946.700	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 dokumen	13.946.700	Sosialisasi KIE Kesetaraan Gender dan Hak Anak untuk Masyarakat Bekerjasama dengan PD (Narasumber untuk KIE ke masyarakat misal seperti penerbitan akte kelahiran, layanan KIA, dll) di Kelurahan Mamburungan, Selumit Pantai, Juata Laut, Karang Anyar Pantai, Pantai Amal	13.868.560
2	8.	0	2.0	000	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	9.399.870	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	9.399.870	sosialisasi Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk meningkatkan kualitas keluarga dilakukan bersama Tim PUSPA melakukan peningkatan kualitas keluarga ke masyarakat di Wilayah Tarakan Timur dan Tarakan Tengah	9.355.590
2	8.	0	2.0		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi yang dikuatkan dan dikembangkan	2 organisasi	12.362.920	Jumlah organisasi yang dikuatkan dan dikembangkan	2 organisasi	12.362.920		11.509.690

2	8.	0	2.0	000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	12.362.920	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	12.362.920	Pelatihan pesertanya PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) dan LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga)	11.509.690
2	8.	0	2.0		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	40 Layanan	9.939.800	Jumlah layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	40 Layanan	9.939.800		9.924.000
2	8.	0	2.0	000	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	40 layanan	9.939.800	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	40 layanan	9.939.800	Layanan Komprehensif ini dilaksanakan oleh Tim Puspaga (Pusat Pemberajaran Keluarga) untuk menjalankan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kualitas keluarga dan kesetaraan gender	9.924.000
2	8.	0			Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak	100%	5.451.960	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak	100%	5.451.960		9.924.000
2	8.	0	2.0		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen responsif gender	1 dokumen	5.451.960	Jumlah dokumen responsif gender	1 dokumen	5.451.960		9.924.000
2	8.	0	2.0	000	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	5.451.960	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	5.451.960	cetak buku, rapat 2x pesertanya BPS, BKPSDM, Setwan, Disnaker, Deperindagkop, Disbudporapar, Dinkes, DLH, Kejaksaan, Polres, Pengadilan	9.924.000

												Negeri, Kemenag, Pengadilan Agama, Disdik, UPT Disdik Prov, BAPAS, LAPAS, BNK, Kecamatan dan Kelurahan	
2 .	8.	0 6.	.		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Nilai indikator penilaian mandiri Kota Layak Anak	875	265.251.100	Nilai indikator penilaian mandiri Kota Layak Anak	875	265.251.100		252.373.633
2 .	8.	0 6.	2.0 1.		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah gugus tugas KLA yang terbentuk	1 gugus tugas	93.364.680	Jumlah gugus tugas KLA yang terbentuk	1 gugus tugas	93.364.680		84.365.508
2 .	8.	0 6.	2.0 1.	000 1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	39 organisa si	55.659.360	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	39 organisa si	55.659.360	kegiatan pelatihan Untuk Tim Gugus Tugas, Satuan Pendidikan dan Tokoh Masyarakat dan mengirim Forum anak mengikuti Kongres Anak Nasional dan untuk pendamping	46.661.508
2 .	8.	0 6.	2.0 1.	000 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokume n	37.705.320	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokume n	37.705.320	Kegiatan Rapat Pembahasan Klaster KLA peserta 20 kelurahan, 4 kecamatan, 30 OPD (Pemkot dan vertikal), PKK, Dunia Usaha dan Media Massa dan masyarakat seperti (Tarakan TV, Equator TV, Radar, Benuanta RRI.	37.704.000

												Pertamina, FAD, Jurkawan dll) dan evaluasi gugus tugas KLA dan peringatan HAN	
2.	8.	06.	2.02.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang aktif	4 lembaga	171.886.420	Jumlah lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang aktif	4 lembaga	171.886.420		168.008.125
2.	8.	06.	2.02.	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	40 anak	150.000.000	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	40 anak	150.000.000	anggaran perbaikan TBRA. Data Perbaikan Kr Anyar Pantai, Kampung 1/skip (2024); Juata Laut/Pamusia n (2025)	148.415.000
2.	8.	06.	2.02.	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 dokumen	21.886.420	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 dokumen	21.886.420	Rakor dan Evaluasi Forum Anak Daerah (Keanggotaan FAD 2023 2024 berakhir jadi rekrutmen FA baru serta evaluasi pelaksanaan 2P FAD (Jumlah anggota FA dari tingkat Kota sd Tingkat kelurahan); Rakor dan Monev Tim Pengawasan dan Pendampingan SRA, RIRA dan PRAP, Pengasuhan Alternatif (Tim Sekber SRA tdd PD,	19.593.125

											Tim RIRA (Kemenag, FKUB, Dewan Mesjid, Takmir Mesjid, Pengurus Gereja, Wihara, Pure, Kunghucu) PRAP (6 Puskesmas dan Dinkes), LKSA/Panti Asuhan); Rakor dan Monev Jejaring Lembaga Penyedia Layanan (P2TP2A, PUSPAGA, LK3, RS, Puskesmas)	
2.	8.	07.	.		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	158.336.087	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	158.336.087	207.591.810
2.	8.	07.	2.01.		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	4 Kegiatan	30.084.000	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	4 Kegiatan	30.084.000	66.483.100
2.	8.	07.	2.01.	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	5 Perangkat daerah	30.084.000	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	5 Perangkat daerah	30.084.000	66.483.100
											Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama LS dalam rangka Pencegahan KTP, KTA, TPPO, ABH dan Perkawinan Anak (Sasaran adalah perangkat Daerah dan Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dengan Tema yg paling banyak ditemukan di masyarakat); Penggerak	

												n dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan KTP, KTA, TPPO, ABH dan Perkawinan Anak (Oleh FAD yang melaksanakan perannya sebagai 2P (menjawab usulan FA di musrenbang) memberikan KIE ke masyarakat dan kelompok sebayanya, dengan inovasinya "we care we share")	
2.	8.	07.	2.02.		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus anak	90 kasus	106.859.727	Jumlah kasus anak	90 kasus	106.859.727		56.203.500
2.	8.	07.	2.02.	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	90 Orang	22.635.197	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	90 Orang	22.635.197	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Pengaduan Jejaring P2TP2A (peserta Polres, Tim Satgas TPPS, TPPS Sekolah, HIMPSI, RS, Puskesmas, PATBM, LBH, Disdik, Kemenag, BNK, Dinsos, Baznas); pengadaan tablet untuk hotline	34.145.600
2.	8.	07.	2.02.	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	90 Layanan	84.224.530	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	90 Layanan	84.224.530	anggaran penanganan untuk kasus anak. Thn 2023 33 kasus. 2024 Juni 20	22.057.900

2	1	2	2.0	001	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 dokume n	24.000.000	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 dokume n	24.000.000		17.137.800
2	1	3			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK	84,00%	75.518.800	Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK	84,00%	75.518.800		2.600.603.512
2	1	3	2.0		<i>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>	<i>Jumlah Layanan advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB</i>	<i>3 Layana n</i>	<i>68.518.800</i>	<i>Jumlah Layanan advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB</i>	<i>3 Layana n</i>	<i>68.518.800</i>		<i>687.688.132</i>
2	1	3	2.0	000	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 laporan	2.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 laporan	34.200.000	untuk audit kasus stunting; makmin rapat: 480 x 40.000 (19jt 200); honor team stunting 13 juta	134.567.540
2	1	3	2.0	001	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 laporan	32.948.000	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 laporan	32.948.000	anggaran buat bayar tagihan listrik dan air 4 balai penyuluhan dan gudang alokon	226.328.912
2	1	3	2.0	001	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 laporan	6.000.000	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 laporan	6.000.000	rakor penurunan stunting (makan minum) 4 kali 4 kecamatan	50.540.000

2	1	.3	2.0	001	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 dokume n	2.800.000	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 dokume n	2.800.000	pembuatan leaflet pencegahan stunting (gemar makan ikan dll)	2.600.000
2	1	.3	2.0	001	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 dokume n	14.770.800	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 dokume n	14.770.800	mak-min penyuluhan	110.831.680
2	1	.3	2.0	001	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasikepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	10 organisa si	10.000.000	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	10 organisa si	10.000.000	penggandaan	162.820.000
2	1	.3	2.0		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah tenaga penyuluh KB dan petugas lapangan KB yang aktif	17 orang	1.000.000	Jumlah tenaga penyuluh KB dan petugas lapangan KB yang aktif	17 orang	1.000.000		43.699.880
2	1	.3	2.0	000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	80 orang	1.000.000	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	80 orang	1.000.000	mak-min rapat dg kader PPKBD	43.699.880
2	1	.3	2.0		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan KB	4 Layana n	4.000.000	Jumlah pelayanan KB	4 Layana n	19.000.000		1.830.715.500

2	1	.3	2.0	000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	1.000.000	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	1.000.000	beli BBM mobil penjemput aseptor KB	29.678.050
2	1	.3	2.0	000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	148 Orang	1.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	148 Orang	1.000.000	mak-min rapat dg aseptor	387.911.850
2	1	.3	2.0	000	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 unit	1.000.000	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 unit	16.000.000	minta tambah anggaran 15.000.000 untuk anggaran desk dak ke balickpapan buat 2 org	1.395.565.600
2	1	.3	2.0	000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	1.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	1.000.000	mak-min rapat dg PKB	17.560.000
2	1	.3	2.0		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah stakeholder atau pemangku kepentingan atau mitra kerja yg berperan scr aktif dlm pengelolaan program KKBPK	85 mitra kerja	2.000.000	Jumlah stakeholder atau pemangku kepentingan atau mitra kerja yg berperan scr aktif dlm pengelolaan program KKBPK	85 mitra kerja	2.000.000		38.500.000
2	1	.3	2.0	000	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 dokumen	1.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 dokumen	1.000.000	mak-min pokja 20 kampung KB	3.720.000

2	1	.3	2.0	000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4 kampung	1.000.000	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4 kampung	1.000.000	mak-min penguatan 20 kampung KB	34.780.000
2	1	.4	.		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	100%	86.599.050	Persentase Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina				754.472.921
2	1	.4	2.0		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	76.599.050	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	76.599.050		155.000.149
2	1	.4	2.0	001	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	1 laporan	10.000.000	Jumlah laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	1 laporan	10.000.000		8.522.600
2	1	.4	2.0	001	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	20 unit	9.999.050	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	20 unit	9.999.500		104.434.000
2	1	.4	2.0	001	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor	30 Orang	46.600.000	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor	30 Orang	46.600.000		32.043.549

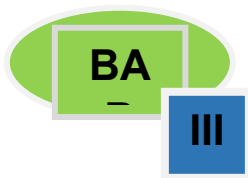
							(UPPKA)			(UPPKA)				
2.	14	.4	2.01.	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	2 kelompok	10.000.000	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	2 kelompok	10.000.000			10.000.000
2.	14	.4	2.02.		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	10.000.000	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	10.000.000			599.472.772
2.	14	.4	2.02.	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 laporan	5.000.000	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 laporan	5.000.000			233.828.500
2.	14	.4	2.02.	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1 laporan	5.000.000	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1 laporan	5.000.000			365.644.272

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan tahun 2025 belum melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan.

Tabel
DAFTAR USULAN (ASPIRASI) MASYARAKAT DINAS
TAHUN 2025

No.	Program kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Besaran volume	Pagu	Catatan
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Berdasarkan RKPD Kota Tarakan tahun 2025-2026, Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tahun 2025 merupakan tahun pertama pembangunan jangka menengah daerah, oleh karena itu segala kebijakan yang akan dilaksanakan harus mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, dalam merumuskan dokumen perencanaan pembangunan harus memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lain yang berkorelasi dan relevan. Oleh karena itu, dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Tahun 2025 ini perlu adanya berbagai pemahaman dan kajian tentang dokumen perencanaan pembangunan, baik nasional, Provinsi Kalimantan Utara maupun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025.

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.

A. Prioritas dan sasaran pembangunan Nasional Tahun 2025

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, isu strategis nasional yang sedang berkembang termasuk penanganan kemiskinan, pelayanan dasar, visi dan misi, serta program kepala daerah.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Nasional tahun 2026 selanjutnya dituangkan ke dalam Rancangan Awal RKP Tahun 2025 dengan 8 (Delapan) Prioritas Nasional. 8 (Delapan) Prioritas Nasional tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai

pelaksanaan kerangka tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

8 (Delapan) Prioritas Nasional RKP Tahun 2025 disampaikan sebagai berikut :

- 1) Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.
- 2) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Medorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
- 3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif koperasi.
- 4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.
- 5) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
- 6) Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
- 7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
- 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026 (DI PILIH SESUAI DENGAN TUGAS DAN POKOK FUNGSI OPD)

Untuk mengawal keberhasilan prioritas nasional tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengintegrasikan sasaran pembangunan nasional dengan Renja PD pada tahun 2025 sebagai berikut :

	Prioritas Nasional		Sasaran Pembangunan
PN 1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	1	Indeks Demokrasi Indonesia
PN 2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Medorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1	Asia Power Index <i>(Military Capability)</i>
		2	Asia Power Index <i>(Diplomatic Influence)</i>
		3	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya
			Pravelensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU)
		4	Indeks Ketahanan Energi
		5	Kapasitas Tampung Air (m ³ /Kapita)
		6	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)
		7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)
		8	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global
		9	Indeks Ekonomi Hijau
		10	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer
		11	Timbunan Sampah terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
		12	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		14	Persentase Penurunan Emisi GRK - Tahunan (%) - Kumulatif (%)

PN 3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif koperasi	1	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)
		2	Rasio Kewirausahaan (%)
		3	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)
		4	Rasio PDB Pariwisata (%)
		5	Devisa Pariwisata (Miliar USD)
		6	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)
		7	Aset Perbankan / PDB (%)
		8	Aset Dana Pensiun / PDB (%)
		9	Aset Asuransi / PDB (%)
		10	Kapitalisasi Pasar Modal / PDB (%)
		11	Total Kredit / PDB (%)
		12	Inklusi Keuangan (%)
PN 4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	1	Hasil Pembelajaran : a) Rata-rata Nilai PISA i. Membaca ii. Matematika iii. Sains
			b) Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (Tahun)
			c) Harapan Lama Sekolah (Tahun)
		2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)
		3	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)
		4	Tingkat Penguasaan Iptek : a) Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB) b) Peringkat Indeks Inovasi Global

		5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
		6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
		7	Usia Harapan Hidup (Tahun)
		8	Kesehatan Ibu dan Anak a) Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup) b) Prevalensi <i>Stunting</i> (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)
		9	Insidensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)
		10	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)
		11	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)
		12	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
PN 5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)
		2	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)
		3	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)
		4	Biaya Logistik (% PDB)
PN 6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1	Terbangunnya Sistem Perlindungan Sosial yang Adaptif bagi Seluruh Penduduk (%)
		2	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)
		3	Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal (%)
		4	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)

		5	Persentase Desa Mandiri (%)
		6	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)
PN 7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	1	<i>Return on Asset</i> (ROA) BUMN (%)
		2	Indeks Integritas Nasional
		3	Indeks Materi Hukum
		4	Indeks Pelayanan Publik
		5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
		6	Indeks Persepsi Korupsi
		7	Indeks Pembangunan Hukum
		8	Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)
		9	Tingkat Inflasi (%)
PN 8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
		2	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
		3	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)

B. Prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Tahapan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun periode 2021-2026 memasuki tahun ke empat. Dalam rangka mencapai visi pembangunan Provinsi Kalimantan Utara periode 2021-2026, maka ditetapkan tema atau fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 :

“Pemantapan Industri dan Perdagangan komoditas Unggulan Daerah”

Pada Tahun 2025 dipastikan sebagian besar target dari tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026 dapat tercapai, yang memastikan semakin meningkatnya manfaat dan hasil nyata pelaksanaan program dan kegiatan seluruh perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa/Kelurahan bagi perubahan, kemajuan rakyat dan kemajuan daerah. Hal tersebut didukung oleh semakin mantapnya kualitas inovasi industri daerah dan kemajuan perdagangan produk unggulan industri yang didukung kualitas sumberdaya manusia, kuantitas dan kualitas infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan kondisi semakin tingginya pertumbuhan serta pemerataan ekonomi.

Dengan mencermati dan memahami dinamika pembangunan, permasalahan, dan menelaah sasaran dan prioritas dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026 khususnya tahun 2025 dengan tema pembangunan Provinsi Kalimantan Utara maka prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :

1. Pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan.
2. Pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI)
3. Penguatan Ketahanan Pangan Daerah dengan Pembangunan Pertanian dalam arti luas dan Jaminan Perlindungan kepada Petani, Nelayan dan Petani Tambak tambak di setiap Kabupaten/Kota.
4. Penguatan Konektivitas Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah terpencil dalam Membangun Desa Menata Kota di setiap Kabupaten/Kota.
5. Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan di Kabupaten/Kota.
6. Pembangunan Ekonomi melalui Diversifikasi Produk dan Keunggulan Komperatif di setiap Kabupaten/Kota.
7. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun yang Berwawaskan.
8. Pengadaan Balai Latihan Kerja, Perluasan Lapangan Kerja, Kesempatan Usaha dan Ekonomi Kreatif bagi Kaum Milenial.
9. Pengelolaan Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pelaku Umkm di Setiap Kabupaten/Kota

10. Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Aparat Desa dan RT, Tenaga Pendidikan, dan Kependidikan pada Semua Tingkatan Satuan Pendidikan, Tenaga Kesehatan serta Tenaga Honorer di Daerah Perbatasan, Pedalaman dan Terpencil serta Perkotaan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TARAKAN.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama dua tahun.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah:

1. Meningkatkan Kesetaraan Gender

Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan Perempuan.

2. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak.

Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:

- a. Meningkatnya peran perempuan, anak, keluarga, masyarakat dalam Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Anak

3. Meningkatnya Keluarga Sejahtera

Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Keluarga Berkualitas

Tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4
Tujuan dan Sasaran Tahun 2026
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Tahun 2025
Meningkatkan Kesenjangan Gender	Indeks Ketimpangan Gender	Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	IPG	92,73	92,80
			IDG	58,61	60,13
Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	Predikat Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Meningkatnya peran perempuan, anak, keluarga, masyarakat dalam Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Anak	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan (KtP)	0,091	0,03
	Indeks Perlindungan Anak		Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak (KtA)	0,733	0,12
Meningkatkan Kesenjangan Gender	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Mewujudkan keluarga berkualitas	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	66,65	67,2

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 5 adalah sebagai berikut:

Tabel 5

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Perkiraan Maju Tahun 2026	
1	2	3	4	5				Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)					(2)	(3)		(4)	(5)		(7)	(8)
2.					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.070.328.250			5.594.464.147
2.	8.	..			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				4.817.972.880			5.003.281.737
2.	8.	01.	.		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi		100%	3.931.789.883		100%	4.087.700.170
2.	8.	01.	2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersedia		1 Dokumen	10.000.000		1 Dokumen	10.000.000
2.	8.	01.	2.01.	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tarakan	1 Laporan	10.000.000	APBD	1 Laporan	10.000.000
2.	8.	01.	2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu		2 Layanan	3.696.214.978		2 Layanan	3.852.125.265
2.	8.	01.	2.02.	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tarakan	25 orang/bln	3.637.288.978	APBD	25 orang/bln	3.793.199.265
2.	8.	01.	2.02.	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tarakan	1 dokumen	58.926.000	APBD	1 dokumen	58.926.000
2.	8.	01.	2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana		3 Layanan	62.417.700		3 Layanan	62.417.700
2.	8.	01.	2.06.	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tarakan	1 paket	24.996.060	APBD	1 paket	24.996.060
2.	8.	01.	2.06.	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tarakan	2 paket	4.979.840	APBD	2 paket	4.979.840
2.	8.	01.	2.06.	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tarakan	7 laporan	32.441.800	APBD	7 laporan	32.441.800
2.	8.	01.	2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan		23 Buah	44.277.850		7 Buah	44.277.850
2.	8.	01.	2.07.	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tarakan	23 buah	44.277.850	APBD	7 Buah	44.277.850
2.	8.	01.	2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia		2 Layanan	73.516.021		2 Layanan	73.516.021
2.	8.	01.	2.08.	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tarakan	1 laporan	2.000.000	APBD	1 laporan	2.000.000
2.	8.	01.	2.08.	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tarakan	1 laporan	71.516.021	APBD	1 laporan	71.516.021
2.	8.	01.	2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara		30 Unit	45.363.334		30 Unit	45.363.334
2.	8.	01.	2.09.	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tarakan	8 unit	2.709.000	APBD	8 unit	2.709.000
2.	8.	01.	2.09.	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tarakan	14 unit	32.784.334	APBD	14 unit	32.784.334
2.	8.	01.	2.09.	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tarakan	15 unit	9.870.000	APBD	15 unit	9.870.000

2.	8.	02.	.		Program Pengarus Utama Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan PUG yang aktif		96%	263.842.640		96%	288.394.000
2.	8.	02.	2.01.		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang dilatih PUG		1 Lembaga	13.842.640		1 Lembaga	38.394.000
2.	8.	02.	2.01.	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	30 OPD	13.842.640	APBD	30 Orang	38.394.000
2.	8.	02.	2.03.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang dibina		2 lembaga	250.000.000		2 lembaga	250.000.000
2.	8.	02.	2.03.		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Tarakan	2 lembaga	250.000.000	APBD	2 lembaga	250.000.000
2.	8.	03.	.		Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlayani		100%	147.651.920		100%	147.648.460
2.	8.	03.	2.01.		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan		7 Kegiatan	20.041.860		7 Kegiatan	20.041.840
2.	8.	03.	2.01.	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	4 Dokumen	20.041.860	APBD	4 Dokumen	20.041.840
2.	8.	03.	2.02.		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang mendapat pelayanan (data simponi)		90 kasus	108.758.360		90 kasus	108.755.220
2.	8.	03.	2.02.	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Tarakan	90 orang	15.369.500	APBD	90 Orang	15.369.370
2.	8.	03.	2.02.	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	4 layanan	93.388.860	APBD	4 layanan	93.385.850
2.	8.	03.	2.03.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang didampingi		1 lembaga	18.851.700		8 Lembaga	18.851.400
2.	8.	03.	2.03.	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Tarakan	50 orang	18.851.700	APBD	50 orang	18.851.400
2.	8.	04.	.		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Puspuga yang aktif		25%	45.649.290		25%	45.460.790
2.	8.	04.	2.01.		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media KIE yang memuat informasi kesetaraan gender dan hak anak yang terdistribusi		100 buah	23.346.570		100 buah	23.346.230
2.	8.	04.	2.01.	0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Tarakan	1 dokumen	13.946.700	APBD	12 Dokumen	13.946.360
2.	8.	04.	2.01.	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	1 dokumen	9.399.870	APBD	1 Dokumen	9.399.870
2.	8.	04.	2.02.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi yang dikuatkan dan dikembangkan		2 organisasi	12.362.920		2 organisasi	12.175.120
2.	8.	04.	2.02.	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	30 orang	12.362.920	APBD	30 orang	12.175.120
2.	8.	04.	2.03.		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak		40 Layanan	9.939.800		40 Layanan	9.939.440

2.	8.	04.	2.03.	0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Tarakan	40 layanan	9.939.800	APBD	40 layanan	9.939.440
2.	8.	05.	.		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak		100%	5.451.960		100%	5.451.850
2.	8.	05.	2.01.		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen responsif gender		1 dokumen	5.451.960		1 Dokumen	5.451.850
2.	8.	05.	2.01.	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	1 dokumen	5.451.960	APBD	2 Dokumen	5.451.850
2.	8.	06.	.		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Nilai indikator penilaian mandiri Kota Layak Anak		875	265.251.100		875	270.050.900
2.	8.	06.	2.01.		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah gugus tugas KLA yang terbentuk		1 gugus tugas	93.364.680		1 gugus tugas	98.164.620
2.	8.	06.	2.01.	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Tarakan	39 organisasi	55.659.360	APBD	39 organisasi	60.459.300
2.	8.	06.	2.01.	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	1 Dokumen	37.705.320	APBD	24 Dokumen	37.705.320
2.	8.	06.	2.02.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang aktif		4 lembaga	171.886.420		13 Lembaga	171.886.280
2.	8.	06.	2.02.	0001	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	1 dokumen	150.000.000	APBD	1 dokumen	150.000.000
2.	8.	06.	2.02.	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	4 dokumen	21.886.420	APBD	5 Dokumen	21.886.280
2.	8.	07.	.		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani		100%	158.336.087		100%	158.575.567
2.	8.	07.	2.01.		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak		4 Kegiatan	30.084.000		4 Kegiatan	30.070.000
2.	8.	07.	2.01.	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Tarakan	5 Perangkat daerah	30.084.000	APBD	1000 Orang	30.070.000
2.	8.	07.	2.02.		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus anak		90 kasus	106.859.727		40 Kasus	106.566.597
2.	8.	07.	2.02.	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Tarakan	90 Orang	22.635.197	APBD	40 Orang	22.635.197
2.	8.	07.	2.02.	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Tarakan	90 Layanan	84.224.530	APBD	40 Layanan	83.931.400
2.	8.	07.	2.03.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan yang mendapatkan pendampingan		5 lembaga	21.392.360		5 lembaga	21.938.970

2.	8.	07.	2.03.	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	Tarakan	1 Laporan	1.000.000	APBD	30 Orang	1.000.000
2.	8.	07.	2.03.	0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus (anak berkasus, anak mengalami bencana)	Tarakan	20 orang	20.392.360	APBD	20 orang	20.938.970
2.	14	...			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				252.355.370			591.182.410
2.	14	.2.	.		Program Pengendalian Penduduk	Persentase keluarga yang terdata		50,00%	90.237.520		50,00%	395.238.640
2.	14	.2.	2.02.		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data keluarga		1 dokumen	90.237.520		1 dokumen	395.238.640
2.	14	.2.	2.02.	0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Tarakan	1 dokumen	14.400.000	APBD	1 dokumen	296.397.600
2.	14	.2.	2.02.	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Tarakan	1 dokumen	49.958.800	APBD	1 dokumen	72.962.240
2.	14	.2.	2.02.	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Tarakan	1 laporan	20.878.720	APBD	1 laporan	20.878.800
2.	14	.2.	2.02.	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Tarakan	1 dokumen	5.000.000	APBD	1 dokumen	5.000.000
2.	14	.3.	.		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK		84,00%	75.518.800		84,00%	111.449.780
2.	14	.3.	2.01.		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Layanan advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB		3 Layanan	68.518.800		3 Layanan	103.450.000
2.	14	.3.	2.01.	0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Tarakan	1 laporan	2.000.000	APBD	1 laporan	2.000.000
2.	14	.3.	2.01.	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Tarakan	1 laporan	32.948.000	APBD	1 laporan	42.750.000
2.	14	.3.	2.01.	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), danMini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Tarakan	1 laporan	6.000.000	APBD	1 laporan	6.000.000
2.	14	.3.	2.01.	0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Tarakan	1 dokumen	2.800.000	APBD	1 dokumen	28.000.000
2.	14	.3.	2.01.	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Tarakan	1 dokumen	14.770.800	APBD	1 dokumen	14.700.000
2.	14	.3.	2.01.	0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasikepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Tarakan	10 organisasi	10.000.000	APBD	10 organisasi	10.000.000
2.	14	.3.	2.02.		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah tenaga penyuluh KB dan petugas lapangan KB yang aktif		17 orang	1.000.000		17 orang	2.000.000
2.	14	.3.	2.02.	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Tarakan	80 orang	1.000.000	APBD	80 orang	2.000.000
2.	14	.3.	2.03.		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan KB		4 Layanan	4.000.000		4 Layanan	3.999.780

2.	14	.3.	2.03.	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Tarakan	1 laporan	1.000.000	APBD	1 laporan	1.000.000
2.	14	.3.	2.03.	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Tarakan	148 Orang	1.000.000	APBD	148 Orang	1.000.000
2.	14	.3.	2.03.	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tarakan	1 unit	1.000.000	APBD	1 unit	999.780
2.	14	.3.	2.03.	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Tarakan	1 laporan	1.000.000	APBD	1 laporan	1.000.000
2.	14	.3.	2.04.		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah stakeholder atau pemangku kepentingan atau mitra kerja yg berperan scr aktif dlm pengelolaan program KKBPK		85 mitra kerja	2.000.000		85 mitra kerja	2.000.000
2.	14	.3.	2.04.	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Tarakan	1 dokumen	1.000.000	APBD	1 dokumen	1.000.000
2.	14	.3.	2.04.	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Tarakan	4 kampung	1.000.000	APBD	20 Kampung KB	1.000.000
2.	14	.4.	.		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina		100%	86.599.050			84.493.990
2.	14	.4.	2.01.		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan		2 kegiatan	76.599.050		2 kegiatan	74.493.990
2.	14	.4.	2.01.	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Tarakan	1 laporan	10.000.000	APBD	1 laporan	7.917.340
2.	14	.4.	2.01.	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Tarakan	20 unit	9.999.050	APBD	4 Unit	9.999.050
2.	14	.4.	2.01.	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Tarakan	30 Orang	46.600.000	APBD	30 Orang	46.577.600
2.	14	.4.	2.01.	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Tarakan	2 kelompok	10.000.000	APBD	2 kelompok	10.000.000
2.	14	.4.	2.02.		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan		2 kegiatan	10.000.000		2 kegiatan	10.000.000
2.	14	.4.	2.02.	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Tarakan	1 laporan	5.000.000	APBD	1 laporan	5.000.000
2.	14	.4.	2.02.	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Tarakan	1 laporan	5.000.000	APBD	1 laporan	5.000.000

4.1 RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA .

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Transisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025 – 2026. Renja ini disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan tahun 2025. Rancangan Awal Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah. Rencana kerja ini memuat tujuan dan sasaran, Program dan Kegiatan serta sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka mencapai Visi dan Misi serta tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

4.2 PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA .

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2026 di dukung oleh pendanaan yaitu dari anggaran APBD Kota Tarakan Tahun 2026.

Hasil Perumusan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan disajikan dalam **tabel 6** sebagai berikut :

TABEL. 6
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2026

TUJUAN	SASARAN	KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RENJA 2026			OPD
		1	2	3	4	5		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Meningkatkan layanan inklusi sosial dan kesetaraan gender	1. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	2.					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.070.328.250	
		2.	8.	..			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			4.817.972.880	DPPPAPPKB
	1. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	2.	8.	01.	.		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	3.931.789.883	DPPPAPPKB
		2.	8.	01.	2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersedia	1 Dokumen	10.000.000	DPPPAPPKB
		2.	8.	01.	2.01.	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.000.000	DPPPAPPKB
		2.	8.	01.	2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2 Layanan	3.696.214.978	DPPPAPPKB
		2.	8.	01.	2.02.	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang/bln	3.637.288.978	DPPPAPPKB
		2.	8.	01.	2.02.	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	58.926.000	DPPPAPPKB
		2.	8.	01.	2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	3 Layanan	62.417.700	DPPPAPPKB
		2.	8.	01.	2.06.	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	24.996.060	DPPPAPPKB
		2.	8.	01.	2.06.	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	4.979.840	DPPPAPPKB
		2.	8.	01.	2.06.	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 laporan	32.441.800	DPPPAPPKB
		2.	8.	01.	2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	23 Buah	44.277.850	DPPPAPPKB
		2.	8.	01.	2.07.	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 buah	44.277.850	DPPPAPPKB
		2.	8.	01.	2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	2 Layanan	73.516.021	DPPPAPPKB
		2.	8.	01.	2.08.	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	2.000.000	DPPPAPPKB
		2.	8.	01.	2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	30 Unit	45.363.334	DPPPAPPKB
		2.	8.	01.	2.09.	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	2.709.000	DPPPAPPKB
		2.	8.	01.	2.09.	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	32.784.334	DPPPAPPKB
		2.	8.	01.	2.09.	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	9.870.000	DPPPAPPKB

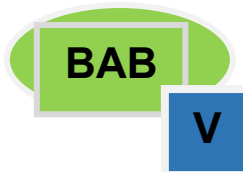
	1. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	2.	8.	02.	.		Program Pengarus Utama Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan PUG yang aktif	96%	263.842.640	DPPPAPPKB
		2.	8.	02.	2.01.		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang dilatih PUG	1 Lembaga	13.842.640	DPPPAPPKB
		2.	8.	02.	2.01.	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 OPD	13.842.640	DPPPAPPKB
		2.	8.	02.	2.03.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang dibina	2 lembaga	250.000.000	DPPPAPPKB
		2.	8.	02.	2.03.		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	2 lembaga	250.000.000	DPPPAPPKB
	2. Meningkatkan Perlindungan Perempuan, anak dan pemberdayaan keluarga	2.	8.	03.	.		Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlayani	100%	147.651.920	DPPPAPPKB
		2.	8.	03.	2.01.		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	7 Kegiatan	20.041.860	DPPPAPPKB
		2.	8.	03.	2.01.	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	20.041.860	DPPPAPPKB
		2.	8.	03.	2.02.		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang mendapat pelayanan (data simponi)	90 kasus	108.758.360	DPPPAPPKB
		2.	8.	03.	2.02.	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	90 orang	15.369.500	DPPPAPPKB
		2.	8.	03.	2.02.	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 layanan	93.388.860	DPPPAPPKB
		2.	8.	03.	2.03.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang didampingi	1 lembaga	18.851.700	DPPPAPPKB
		2.	8.	03.	2.03.	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 orang	18.851.700	DPPPAPPKB
	1. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	2.	8.	04.	.		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Puspuga yang aktif	25%	45.649.290	DPPPAPPKB
		2.	8.	04.	2.01.		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media KIE yang memuat informasi kesetaraan gender dan hak anak yang terdistribusi	100 buah	23.346.570	DPPPAPPKB
		2.	8.	04.	2.01.	0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 dokumen	13.946.700	DPPPAPPKB
		2.	8.	04.	2.01.	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	9.399.870	DPPPAPPKB

		2.	8.	04.	2.02.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi yang dikuatkan dan dikembangkan	2 organisasi	12.362.920	DPPPAPPKB
		2.	8.	04.	2.02.	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	12.362.920	DPPPAPPKB
		2.	8.	04.	2.03.		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	40 Layanan	9.939.800	DPPPAPPKB
		2.	8.	04.	2.03.	0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	40 layanan	9.939.800	DPPPAPPKB
	1. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	2.	8.	05.	.		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak	100%	5.451.960	DPPPAPPKB
		2.	8.	05.	2.01.		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen responsif gender	1 dokumen	5.451.960	DPPPAPPKB
		2.	8.	05.	2.01.	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	5.451.960	DPPPAPPKB
	2. Meningkatkan Perlindungan Perempuan, anak dan pemberdayaan keluarga	2.	8.	06.	.		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Nilai indikator penilaian mandiri Kota Layak Anak	875	265.251.100	DPPPAPPKB
		2.	8.	06.	2.01.		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah gugus tugas KLA yang terbentuk	1 gugus tugas	93.364.680	DPPPAPPKB
		2.	8.	06.	2.01.	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	39 organisasi	55.659.360	DPPPAPPKB
		2.	8.	06.	2.01.	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	37.705.320	DPPPAPPKB
		2.	8.	06.	2.02.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang aktif	4 lembaga	171.886.420	DPPPAPPKB
		2.	8.	06.	2.02.	0001	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	150.000.000	DPPPAPPKB
		2.	8.	06.	2.02.	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 dokumen	21.886.420	DPPPAPPKB
		2.	8.	07.	.		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	158.336.087	DPPPAPPKB

		2.	8.	07.	2.01.		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	4 Kegiatan	30.084.000	DPPPAPPKB
		2.	8.	07.	2.01.	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	5 Perangkat daerah	30.084.000	DPPPAPPKB
		2.	8.	07.	2.02.		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus anak	90 kasus	106.859.727	DPPPAPPKB
		2.	8.	07.	2.02.	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	90 Orang	22.635.197	DPPPAPPKB
		2.	8.	07.	2.02.	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	90 Layanan	84.224.530	DPPPAPPKB
		2.	8.	07.	2.03.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan yang mendapatkan pendampingan	5 lembaga	21.392.360	DPPPAPPKB
		2.	8.	07.	2.03.	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	1 Laporan	1.000.000	DPPPAPPKB
		2.	8.	07.	2.03.	0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus (anak berkasus, anak mengalami bencana)	20 orang	20.392.360	DPPPAPPKB
	3. Terwujudnya keluarga yang berkualitas	2.	14	...			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			252.355.370	DPPPAPPKB
		2.	14	.2.	.		Program Pengendalian Penduduk	Persentase keluarga yang terdata	50,00%	90.237.520	DPPPAPPKB
		2.	14	.2.	2.02.		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data keluarga	1 dokumen	90.237.520	DPPPAPPKB
		2.	14	.2.	2.02.	0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 dokumen	14.400.000	DPPPAPPKB
		2.	14	.2.	2.02.	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 dokumen	49.958.800	DPPPAPPKB
		2.	14	.2.	2.02.	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 laporan	20.878.720	DPPPAPPKB
		2.	14	.2.	2.02.	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 dokumen	5.000.000	DPPPAPPKB
		2.	14	.3.	.		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK	84,00%	75.518.800	DPPPAPPKB
		2.	14	.3.	2.01.		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Layanan advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB	3 Layanan	68.518.800	DPPPAPPKB
		2.	14	.3.	2.01.	0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 laporan	2.000.000	DPPPAPPKB
		2.	14	.3.	2.01.	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 laporan	32.948.000	DPPPAPPKB
		2.	14	.3.	2.01.	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 laporan	6.000.000	DPPPAPPKB

		2.	14	.3.	2.01.	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 dokumen	2.800.000	DPPPAPPKB
		2.	14	.3.	2.01.	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 dokumen	14.770.800	DPPPAPPKB
		2.	14	.3.	2.01.	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasikepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	10 organisasi	10.000.000	DPPPAPPKB
		2.	14	.3.	2.02.		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah tenaga penyuluh KB dan petugas lapangan KB yang aktif	17 orang	1.000.000	DPPPAPPKB
		2.	14	.3.	2.02.	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	80 orang	1.000.000	DPPPAPPKB
		2.	14	.3.	2.03.		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan KB	4 Layanan	4.000.000	DPPPAPPKB
		2.	14	.3.	2.03.	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	1.000.000	DPPPAPPKB
		2.	14	.3.	2.03.	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	148 Orang	1.000.000	DPPPAPPKB
		2.	14	.3.	2.03.	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 unit	1.000.000	DPPPAPPKB
		2.	14	.3.	2.03.	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	1.000.000	DPPPAPPKB
		2.	14	.3.	2.04.		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah stakeholder atau pemangku kepentingan atau mitra kerja yg berperan scr aktif dim pengelolaan program KKBPK	85 mitra kerja	2.000.000	DPPPAPPKB
		2.	14	.3.	2.04.	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 dokumen	1.000.000	DPPPAPPKB
		2.	14	.3.	2.04.	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4 kampung	1.000.000	DPPPAPPKB
		2.	14	.4.	.		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	100%	86.599.050	DPPPAPPKB
		2.	14	.4.	2.01.		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	76.599.050	DPPPAPPKB
		2.	14	.4.	2.01.	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	1 laporan	10.000.000	DPPPAPPKB
		2.	14	.4.	2.01.	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA))	20 unit	9.999.050	DPPPAPPKB

		2.	14	.4.	2.01.	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	30 Orang	46.600.000	DPPPAPKB
		2.	14	.4.	2.01.	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	2 kelompok	10.000.000	DPPPAPKB
		2.	14	.4.	2.02.		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	10.000.000	DPPPAPKB
		2.	14	.4.	2.02.	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 laporan	5.000.000	DPPPAPKB
		2.	14	.4.	2.02.	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1 laporan	5.000.000	DPPPAPKB



PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2026.

Rancangan Awal Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan serta sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Rancangan Awal Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan tahun 2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD.

Tarakan, Maret 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak serta Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Hasman Parigi, S.E., M.M
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19720822 2010011 001